# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia pemilihan umum merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih dan menentukan wakil rakyat ataupun pemimpinnya. Setelah berakhirnya era orde baru Indonesia seakan mendapatkan anginsegar, rakyat semakin bebas berpendapat,pemilihan umum yang jujur dan adil, serta kebebasan pers. Pemilihan umum legislative atau pileg sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan kabupaten atau kota dengan pengembangan sarana demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia. Pileg berfungsi memilih para wakil-wakil rakyat daerah secara langsung oleh rakyat yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat yang berhak pilih (UU NO. 32 Tahun 2004 dan PP no. 6 Tahun 2005). Sehingga setiap rakyat Indonesia mempunyai suara hak yang sama dalam menentukan pemimpinnya.

Dalam pemilihan legislatif, calon wakil rakyat menggunakan partai politik sebagai kendaraannya untuk mengisi kursi dalam parlemen. Partai politik memiliki strategi tersendiri dalam merebutkan kursi parlemen. Semakin banyak kader partai politik yang mengisi di parlemen, semakin

mudah pula partai politik mengatur sistem pemerintahan yang ada melalui sebuah pengambilan kebijakan. Karena semakin banyak anggota parpol yang megisi dalam parlemen, semakin mudah pula dalam pengambilan keputusan melalui voting. Tak heran banyak parpol berlomba dalam strategi suksesi calon legislatif atau caleg.

Partai politik adalah salah satu wadah yang di gunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang nantinya akan di tujukan kepada salah satu calon anggota legislative yang di calonkan oleh suatu partai tersebut. Di Indonesia partai politik semakin berkembang dengan pesat, di tandai dengan munculnya partai-partai baru yang mempunyai visi dan misi yang lebih inovatif. Berikut adalah contoh-contoh partai politik yang ada di Indonesia 1. Partai PDIP 2. Partai GOLKAR 3. Partai GERINDRA 4. Partai DEMOKRAT 5. Partai HANURA 6. Partai PAN 7. Partai PKB dan masih banyak lagi. Untuk mengisi kursi parlemen biasanya partai politik akan mencalonkan para calon legislatifnya melalui pengkaderan. pengkaderan sendiri salah satunya dapat dilakukan memalui organisasi sayap partai.

Organisasi sayap partai sendiri berperan untuk menjangkau lapisan atau golongan-golongan masyarakat seperti petani,generasi muda,kaum perempuan dan kaum buruh. Dengan adanya organisasi sayap partai di setiap daerah maka semakin banyak peluang untuk mengenalkan dan mensosialisasikan tujuan atau visi dan misi suatu partai tersebut. Partai melaui strukturalnya dalam organisasi bekerja sama dalam melakukan

pemenangan pemilu. PDIP Di tingkat Kabupaten atau Kota biasanya disebut DPC (Dewan Pengurus Cabang), di tingkat Kabupaten biasanya dibantu oleh PAC (Pengurus Anak Cabang). Selain itu juga dibantu oleh organ lain yang berafiliasi dengan partai PDIP yaitu ada juga TMP (Taruna Merah Putih) dan REPDEM ( relawan perjuanan demokrasi ) dan salah satunya BMI (Banteng Muda Indonesia).

Banteng muda Indonesia merupakan salah satu organisasi sayap partai yang memiliki peran meregenasi pengurus dan membantu kinerja partai. Banteng muda Indonesia berdiri pada tanggal 29 maret tahun 2000 di semarang. Banteng mudaa sendiri merupakan organisai sayap partai PDI Perjuangan sesuai dengan ketetapan DPP PDI Perjuangan No: 034/TAP/DPP/XII/2006 tentang Banteng Muda Indonesia sebagai organisasi sayap partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fungsi dari organisasi banteng muda Indonesia sendiri adalah yang pertama, perekrutan dan pembinaan kader bangasa yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Yang kedua, jaringan aspiratif generasi muda. Dan yang terakhir adalah sebagai alat perjuangan kaum muda PDI Perjuangan dalam rangka menjalankan Misi dan Visi partai bagi kepentingan rakyat.

Di Provinsi Yogkarta terdapat 3 anggota DPRD yang berasal dari anggota BMI. Sementara untuk di kota Yogyakarta sendiri terdapat 5 anggota DPRD yang berasal anggota BMI yaitu Dari dapil 2 ada Bpk.Dwi Warsono yang menduduki komisi D di parlemen, Bpk. Emanuel Ardi Prasetyo menduduki komisi C di parlemen, Dari dapil 3 ada Bpk.Dedy

Setyawan yang menduduki komisi B di parlmen. Dan dari Dapil 4 dan 5 ada Bpk. Antonius Foky Ardianto menduduki komisi D di parlemen dan Bpk. Mugiono Pujo Kusumo yang menduduki komisi D di parlemen

Begitu banyaknya anggota legislatif yang berasal dari anggota BMI, menjadikan Penelitian terkait bagaimana peran Banteng Muda Indonesia dalam proses suksesi pemilihan legislatif di kota Yogyakarta tahun 2014 menarik.

## B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran Banteng Muda Indonesia dalam proses suksesi pemilihan legislatifanggota DPRD kota di Yogyakarta tahun 2014?

## C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi dari organsasi sayap partai Banteng Muda Indonesia dalam suksesi pemilihan legislative di Kota Yogyakarta tahun 2014.

### 2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi

dalam pembelajaran mengenai peran penting suatu organisasi sayap partai.

b. Manfaat praktis

Penelitan ini dapat membantu mengetahui bagaimana peran dan fungsi organisasi sayap partai dalam membantu atau berkontribusi dalam pemilihan legislatif yang mana dalam pemilihan calon legislatif di usung oleh suatu partai politik. Dimana partai tersebut memiliki beberapa organisasi sayap yang berperan aktif di dalamnya.

## D. KERANGKA DASAR TEORI

1. Partai politik

Menurut UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai poltik di definsikan sebaga organisasi yang bersifat rasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentngan poltik, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan menurut Budiardjo (2008:403) partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.Dapat disimpulkan bahwa

partai politik merupakan sekumpulan atau sekelompok individu yang berkumpul dalam suatu wadah dan memiliki cita-cita, nilai-nila ataupun visi dan misi yang sama. Partai politik sendiri memiliki fungsi ataupun peran guna mewujudkan visi dan misinya.

Menurut Ramlan Surbakti (2009) fungsi dari partai politik merupakan cara dimana mencari dan mempertahankan suatu kekuasaan agar program-program yang tersusun dapat terwujud dan di implementasikan.Fungsi dari partai politik sendiri adalah sebagai berikut :

a. Sosialisai politik

   Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

b. Rekruitmen politik

   Rekruitmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan khususnya pada pemerintahan.

c. Partisipasi politik

   Partisipasi politik merupakan kegiatan sebagai warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan ikut dalam menentukan seorang pemimpin dalam pemerintahan.

2. Organisasi sayap partai

Di Indonesia organisasi sayap partai tertuang dalam UU partai politik yang di sahkan pada tanggal 6 desember 2007 pasal 12 huruf ( j) yang menyebutkan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap partai sendiri memiliki fungsi untuk memperkuat pada eksternal partai, dengan adanya organisasi sayap partai maka akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber massa. seperti para pemuda para petani ataupun kaum buruh.

Dengan adanya organisasi sayap partai juga sangat berpengaruh dengan terbentuknya calon kader yang berkualitas atau dengan kata lain salah satu dari fungsi organisasi sayap partai adalah meregenerasi calon anggota legislative tersebut. Selain itu organisasi sayap partai juga membantu kinerja partai seperti memberikan pendidikan ataupun pengetahuan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi berbaigai isu politik. Organisasi sayap partai juga dapat sebagai sarana pendekatan ataupun pengenalan terhadap suatu partai.

3. Teori Suksesi

Suksesi dalam pengertiannya di pandang sebagai proses perubahan sosial politik dalam pengertian yang luas (Nasikun,2012:18). Suksesi menurut Nasikun (2012:18) berkaitan dengan sistem pembagian otoritas yang mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial di dalam masyarakat. Yakni mereka menduduki sebagai pemenang otoritas,

yangbaik secara substansial maupun arahnya berlawanan satu sama lain.

Dalam buku Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan (1997:17) . Amien Rais mengemukaan bahwa terdapat lima alasan mengapa harus terjadi sebuah suksesi dalam sistem kekuasaan Negara yaitu :

a. Penguasa yang terlalu lama berkuasa akan cenderung melakukan tindak korupsi.
b. Pimpinan nasional yang terlalu lama beerkuasa akan melahirkan kultur individu / the cult of individual, yang mana hal ini akan mengabaikan rasionalisme manusia.
c. Suksesi, rotasi atau regenerai elite adalah sebuah keharusan dalam sebuah istem demokrasi yang ditandai dengan tingginya partisipasi rakyat dalam menentukan kedudukan seorang pemimpin ataupun pengambilan keputusan atau kebijakan Negara.
d. Kelompok elite yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung kehilangan misi ataupun kreatifitas.
e. Sebuah lapisan yang sudah lama memegang kekuasaan secara perlahan akan meyakini bahwa dirinya adalah personifikasi stabilitas dan eksistensi Negara.

Suksesi sendiri dapat kita artikan sebagai suatu pergantian ataupun peralihan kekuasaan pada suatu kepemimpinan. Dalam hal ini kaitanya dengan kepemiminan seorang anggota legislative. Suksesi kepemimpinan sendiri adalah suatu proses yang wajar dan natural seperti yang di sampaikan pada buku Amien Rais ada beberapa faktor

yang mengharuskan suatu suksesi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan bukan hanya merupakan suatu perebutan kekuasaan ataupun perpindahan kekuasaan. Maka dari itu di butuhkan langkah-langkah baik demi terwujudnya suatu kepemiminan yang baik.

a. Mekanisme suksesi kepemiminan

Untuk berlanjutnya kepemiminan sebagai penerus selanjutnya maka perlu adanya proses penentuan kepemiminan. Proses dalam menentukan suatu kepemimpinan tersebut sering kita dengan sebutan regenerasi kepemimpinan. Biasanya Regenerasi kepemiminan berlangsung didalam suatu aturan atau tatanan politik yang jelas. Berikut adalah ciri-ciri mekanisme kepemiminan yang demokrasi di dalam pemilihan calon legislatif:

1. Seluruh anggota partai dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Dengan catatan calon kandidat memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dan memiliki potensi untuk menjadi seorang anggota legislatif.
2. Kandidat yang terpilih, di pilih melalui sebuah pemilihan yang transparan dan dengan cara yang objektif berdasarkan suara terbanyak.

b. Dampak suksesi kepemiminan

Dampak merupakan suatu akibat yang timbul akibat adanya suatu keutusan. Dampak sendiri terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan dampak

yang menghasilkan suatu nilai kebagikan yang dapat dirasakan oleh individu, masyarakat maupun organisasi. Sedangkan dampak negatif adalah dampak yang mengakibatkan sesuatu hal yang buruk bagi setiap masyarakat, individu, maupun organisasi. Dalam hal ini dampak dari suksesi kepemimpinan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti bagaimana pembangunan infrastruktur yang berhasil atau tidak di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang menjabat sebelumnya.

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa suksesi calon legislatif adalah suatu perkembangan atau perubahan yang ada dalam pemilihan calon anggota legislatif. Artinya dalam pemilihan anggota legislatif pasti ada perpindahan kekuasaan dari anggota legislatif yang lama dan di gantikan dengan kader yang baru.Dimana dalam pemilihan calon legislatif tersebut di tandai dengan tingginya partispasi masyarakat dalam menentukan kedudukan calon anggota parlemen. Yang diharapkan dengan adanya perubahan kedudukan para anggota legislatif tersebut maka berbagai macam permasalahan yang ada dapat di atasi dengan kebijakan-kebijakan baru yang di buat.

4. Teori petahana / incumbent

Incumbent atau yang lebih di kenal sekarang dengan kata petahana dalam Cambridge English Dictionary, Incumbent is person who has or had a particular official position. Artinya adalah orang yang telah atau

memiliki posisi resmi tertentu. Dalam dunia politik petahana sendiri terjadi saat pejabat politik yang sedang menduduki jabatan ingin mencalonkan diri lagi untuk periode selanjutnya. Calon petahana atau incumbent akan mencalonkan kembali dalam pemilihan legislative.

Biasanya calon petahana yang mencalonkan diri kembali akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memenangkan pemilihan legislatif atau pileg. Faktor yang memberikan peluang lebih besar antara lain karena masyarakat sudah mengenal dan mengetahui kinerja calon anggota legislatif tersebut. Namun apabila kinerja yang di lakukan oleh calon petahan tersebut di nilai buruk oleh masyarakat maka peluang kekalahan dalam pileg juga besar. Karena seperti yang kita ketahui tugas seorang anggota legislatif sendiri adalah menampung aspirasi rakyat dan membuat kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Apabila kinerja yang dilakukan oleh calon petahana buruk atau kinerja yang dilakukan oleh para petahana tidak sesuai dengan yang masyarakat inginkan baik itu dalam hal kesejahteraan ekonomi ataupun pembangunan infrastruktur maka masyarakat akan menilai calon petahana tersebut gagal.

1. Faktor kemenangan Incumbent
    a. Kampanye permanen

        Posisi incumbent terbilang menguntungkan bagi calon legislatif. Dimana anggota legislatif yang akan mencalonan kembali secara disadari atau tidak nama kandidat tersebut

sudah di ingat oleh masyarakat berdasarkan kinerjanya selama menjabat sebagai anggota legislatif. Dengan kepopularitasan yang dia miliki maka anggota legislatif tidak perlu lagi mengenalkan diri kepada masyarakat, dan dengan kepopularitasan tersebut dapat menjadi modal bagi incumbent untuk mendapatkan suara atau dukungan dari masa ataupun masyarakat.

Selain itu karena incumbent pernah menjabat sebagai salah satu aktor politik atau dalam konteks ini sebagai anggota legislative yang menjabat selama 5 tahun setidaknya dia telah menguasai berbagai opini public. Dengan menggunakan kemampuannya incumbent dapat menggunakan media massa untuk menaikkan citra dirinya, dan dengan menggunakan media masa incumbent juga dapat membuat isu-isu yang dapat menarik perhatian masyarakat selama masa kampanye.

b. Fenomena dan budaya masyarakat

Seperti yang kita ketahui fenomena masyarakat kita dalam menilai seorang anggota legislatif ataupun calon kepala daerah bukan dilihat dari program-program atau kebijakan yang dimiliki incumbent melainkan dilihat dari bantuan-bantuan fisik ataupun uang yang di tawarkan oleh para calon incumbent. Salah satu contoh adalah saat calon anggota legislatif ataupun para incumbent memberikan uang atau

memberikan bantuan berupa sembako yang di bagi-bagikan kepada masyarakat.

dengan adanya kebiasaan yang seperti itu maka masyarakat akan terdoktrin siapa calon yang memberikan bantuan lebih banyak maka dialah yang akan dipilih. Menurut iwan dan andi (2010:67) budaya tersebut terjadi karena Negara kita masih menganut budaya politik yang bersifat patrimonial atau masih memegang faham yang di wariskan oleh nenek moyang dan dengan ikatan primodialatau suatu pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil seperti kepercayaan, tradisi maupun adat istiadat. Ikatan ini ditandai dengan besarnya pengaruh "patron (seseorang yang memiliki kekuasaan)" terhadap masyarakat dan kuatnya sentimen kedaerahan,suku,agama,ras dan sebagainya dalam penentuan pilihan.

c. Media dan opini publik

Dalam dunia politik media merupakan suatu hal yang berperan penting. Dengan adanya media dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. dengan adanya media masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita maupun kabar terkait dengan kondisi politik yang ada diIndonesiamelalui media juga masyarakat dapat menyampaikan apirasi-aspirasi mereka

kepada pejabat politik. Media masa juga cukup berperan bagi institusi pemerintahan maupun politik. karena dengan adanya media masa yang notabene merupakan wadah bagi aspirasi-aspirasi warga ataupun masyarakat maka media dapat dengan mudah membentuk opini public.

Para kandidat atau petahana dapat dengan mudah membentuk asumsi publik menggunakan media. Contohnya apabila para candidat ingin membentuk image yang baik di kalangan masyarakat maka calon petahana dapat mengekspos hasil kinerja mereka ataupun program-program yang telah berhasil di implementasikan melalui media massa.

Dalam teori petahana diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja petahana, budaya yang ada di masyarakat, dan opini public terkait kandidat petahana yang ada di masyarakat.

5. Teori Sistem pemilu

Menurut Budiardjo dalam Andreanus Pito,dkk (2013:hal41) sistem merupakan sebuah istilah yang di pinjam dari ilmu biologi. Sebuah sistem dapat di ibaratkan sebuah organisme yang yang memiliki bagian-bagian ataupun komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi. Sama halnya dengan pemiliha umum yang sering kita sebut dengan pemilu. pemilu memiliki sistem yang berguna agar terjalankannya sebuah pemilu tersebut.

Menurut Joko Prihatmojo dalam Sevenson dan Elkit (2008:hal 8)

menyatakan bahwa pemilu adalah cara yang paling tepat bagi masyarakat untuk ikut serta atau berpatisipasi dalam dunia demokrasi yang sudah sangat berkembang atau modern.

Menurut UU no 15 tahun 2011pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indinesia tahun 1945.

Pemilu memiliki sistem yang menunjuk elemen atau bagian dalam pemiluitu sendiri  yaitu bagaimana tekhnik memilih dan bagaimana tekhnik menghitung. Sistem pemilu terdiri dari dua jenis yaitu: yang pertama adalah menggunakan sistem perwakilan distrik, dimana sistem perwakilan distrik itu di tentukan atas kesatuan geografis atau daerah yang hanya memilih seorang wakil, jumlah distrik tersebut dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen. Yang kedua adalah sistem proporsional atau multi member constituenty dimana dalam sistem ini wilayah pemilihan ini di bagi dalam daerah-daerah yang disebut dengan dapil. Yang mana dalam setiap daerah jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang.

Di Indonesia pemilihan umum dari waktu waktu cenderung menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka yang di tetapkan dengan suara terbanyak. Penggunaan sistem proporsional sendiri di karenakan masyarakat Indonesia cenderung heterogen. Dengan menggunakan sistem pemilihan ,umum yang proporsional maka akan

lebih mudah untuk mendorong fragmentasi partai dan tumbuhnya partai politik baru. namun berakibat juga pertumbuhan partai yang semakin meningkat dan semakin banyak sehingga sehingga akan melahirkan perwakilan yang kurang efektif. Walaupun dari waktu kewaktu menggunakan sistem proporsional namun setiap pemilihan umum terdapat berbagai perbedaan baik itu dari jumlah partai yang mengikuti dan perbedaan jumlah kursi parlemen. Semenjak runtuhnya era orde baru dan berganti menuju ke era reformasi Negara kita telah melaksanakan pemilu dari tahun 2004 hingga 2014 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Berikut adalah perbedaan sistem proporsional dari tahun 1999 - 2014 :

Tabel 1.1 perkembangan perubahan sistem proporsional dari tahun 1999-2014

| 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Menggunakan sistem proporsional daftar tertutup | Menggunakan sistem proporsional terbuka | Menggunakan sistem proporsional terbuka | Menggunakan sistem proporsional terbuka |
| Perolehan kursi di dapat dengan cara Menggunakan nomor urut caleg. Sehingga terdapat caleg yang | Perolehan kursi tidak lagi berdasarkan nomor urut caleg. Kursi di dapat dari perolehan suara | Sama dengan pemilu sebelumnya tahun 2004, Perolehan kursi di dapat dari suara terbanyak. | Pada tahun pileg tahun 2014 masih sama dengan pemilu legislative tahun 2004 dan 2009 yaitu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| menjadi lumbumg suara namun tidak dapat mengisi kursi di parlemen. | terbanyak. | | perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak. |

Pada tahun 1999 pemilihan anggota legislatif berdasarkan nomor urut caleg memiliki mekanisme apabila caleg mendapat nomor urut satu maka secara otomatis caleg tersebut akan mendapatkan kursi di parlemen. Karena dihitung dari jumlah suara yang masuk ke partai sehingga partai seperti berhak menentukan siapa anggota yang akan mengisi kursi parlemen.

Sedangkan di tahun 2004,2009, dan 2014 para calon anggota legislatif tidak lagi menggunakan nomor urut dalam pemilu. melainkan di tentukan dengan suara terbanyak, dan tidak lagi terpaku dari jumlah suara yang di dapatkan oleh partai. Sistem proporsional terbuka sendiri cenderung memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi para calonanggota legislatif. Salah satu dampak positifnya adalah karena tidak menggunakan nomor urut partai maka antara anggota calon legislatif dan pemilih biasanya akan lebih dekat. Hal tersebut terjadi karena rakyat atau pemilih adalah penentu siapa calon yang akan menduduki kursi parlemen. Maka dengan menggunakan sistem proporsional terbuka maka akan cenderung memudahkan para anggota calon legislatif.

Setelah membahas tentang keunggulan sistem proporsional terbuka maka penulis akan membahas kelemahan dari sistem tersebut bagi calon anggota legislatif. Karena pada sistem ini calon tidak menggunakan nomor urut sehingga calon lebih di kenal oleh masyarakat. Otomatis calon memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan pemilih atau rakyat. Dari sini rakyat dapat memilih secara langsung para calon yang dipilihnya. Namun masalahnya adalah karena masyarakat Indonesia masih cenderung memiliki budaya masyarakat yang belum bisa diubah. Yaitu tidak mementingkan program-program dari calon tetapi lebih mementingkan bantuan-bantuan yang mereka terima dari para calon untuk memenangkan posisi sebagai anggota legislatif.

Fenomena tersebut akan melahirkan anggota parlemen yang tidak kompeten. Sistem ini juga berpengaruh bagi para caleg muda yaitu bagi caleg muda yang tidak memiliki kepopularitasan di kalangan masyarakat maka peluang terpilihnya rendah. Namun apabila caleg muda memiliki dana maupun bantuan-bantuan untuk masyarakat dan caleg muda tersebut berkompeten maka tidak menutup kemungkinan caleg tersebut menang dalam pertarungan pemilu. Karena tidak dipungkiri para pendukung caleg muda tersebut juga merupakan kaum muda- kaum muda yang kritis.

Dalam pemilihan anggota legislatif tidak ada larangan atau batasan dalam pencalonan kembali. Dalam artian anggota legislatif yang sudah

menjabat selama dua periode tetap bisa mencalonkan apabila masih mendapat dukungan dari partai dan eksistensi di kalangan masyarakat masih kuat. Berbeda dengan pejabat Negara seperti bupati, gubernur, ataupun presiden yang hanya memiliki batasan berkuasa selama dua periode. Adapun syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menurut UU no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

a. Telah berumur 21 tahun atau lebih
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Cakap berbicara, menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia
e. Berpendidikan paling rendah minimal tamat sekolah menengah keatas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, ataupun pendidikan lain yang sederajat
f. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
g. Tidak pernah di jatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempnyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang yabg diancam dengan pidana

penjara 5 tahun atau lebih.

h. Sehat jasmani dan rohani.

i. Terdaftar sebagai pemilih.

j. Bersedia bekerja penuh waktu.

k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daeah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

l. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai angkintan publik, advokad/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

n. Menjai anggota partai politik peserta pemilu.

o. Dicalonkan hanya pada satu lembaga perwakilan dan

p. Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

## E. DEFINISI KONSEPTUAL

Menurut Masri (1992:34) Definisi konseptual merupakan definisi yang di gunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang akan diteliti. Definisi konseptual juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individdu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

1. Partai Politik

   Partai politik adalah sebauh wadah bagi suatu kelompok yang memiliki tujuan serta cita-cita yang sama, dan dalam partai tersebut memiliki para kader-kader yang akan di calonkan menjadi pejabat politik yang nantinya akan menyampaikan aspirasi-asspirasi dari masyarakat dan akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai bagi setiap permaslahan yang ada. Partai politik juga merupakan cara bagi setiap incumbent atau kandidat untuk meraih sebuah tujuan yaitu kekuasaan, kekuasaan tersebut bisa dalam tingkat daerah atau DPRD,maupun tingkat nasional DPRRI.

2. Organisasi Sayap Partai

   Organisasi sayap partai merupakan cabang atau anak partai yang memiliki peran dan fungsi sangat penting untuk membantu kinerja partai serta mengurus pengkaderan dalam partai. Organisasi juga berfungsi untuk melahirkan kader-kader partai yang berkualitas serta

berompeten. Selain itu organisasi sayap partai juga memiliki fungsi pedekatan dan memberikan pendidikan tentang perpolitikan krpada berbagai lapisan masyarakat seperti petani, kaum perempuan, mahasiswa dan kaum buruh.

3. Suksesi Calon Legislatif

   Suksesi calon legislatif merupakan suatu perubahan, perpindahan atau peralihan suatu kekuasaan maupun jabatan anggota legislatif yang lama dan digantikan dengan kandidat baru. peralihan suatu jabatan sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah habisnya waktu jabatan seorang anggota legislatif dan adanya kader baru yang lebih berpotensi dan memiliki kualitas yang lebih baik sehingga dalam pemilu yang selanjutnya menggantikan kedudukan anggota yang lama.

4. Petahana

   Petahana atau incumbent adalah seorang pejabat politik yang sedang memegang jabatan dan masih aktif dalam jabatan tersebut kemudian dia ingin mencalonkan kembali di pemilihan legislatif selanjutnya. Incumbent atau petahana biasanya memiliki citra yang baik di mata masyarakat sehingga dia mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencalonkan kembali pada periode selanjutnya.

5. Sistem pemilu

   Sistem pemilu merupakan cara dimana pemilu dilakukan melaluai bebrapa tahap. Dalam tahap ini biasanya di peruntukkan untuk bagaimana tekhnik memilih dan tekhnik menghitung. Di Indonesia

sistem pemilu sendiri menggunakan sistem proporsional terbuka dimana dalam sistem ini wilayah pemilihan ini di bagi dalam daerah-daerah yang disebut dengan dapil. Yang mana dalam setiap daerah jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi oprasional merupakan cara bagaimana menggambarkan atau mengukur variable, sehingga dengan adanya definisi operasional maka penelitian dapat di terima dengan jelas dan memiliki struktur yang jelas. Definisi operasioal yang sesuai dengan penelitan diatas adalah sebagai berikut:

1. Fungsi partai politik
    a. Sosialisasi politik
    b. Rekruitmen politik
    c. Partisipasi politik
2. Suksesi keemimpinan
    a. Mekanisme suksesi kepemimpinan
        1. Bagaimana perekrutan atau kaderisasi dari partai
    b. Dampak dari suksesi kepemimpinan
3. Petahana
    a. Kampanye permanen
        1. Berdasar program-program yang telah terlakasana
    b. Budaya masyarakat
        1. Sosialisasi langsung atau dengan seberapa sering calon

anggota legislatif bersentuhan langsung dengan masyarakat.

c. Media dan opini public

4. Sistem pemilu

a. Sistem proporsional terbuka

1. Bagaimana sistem yang digunakan dalam pemilu tahun yaitu pada tahun 1999 mengguanakan sistem proporsional, sedangkan tahun 2004- 2014 menggunakan sistem proporsinal terbuka dengan peroehan suara terbanyak.

2. Perolehan suara caleg muda di bandingkan dengan caleg senior. Perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif dari BMI:

a. Dwi saryono (46) Dapil 2 memperoleh suara sebanyak 3.733 suara.

b. Emanuel ardy prasetyo (41) Dapil 2 memperoleh suara sebanyak 2.665 suara.

c. GM. Deddy jati S (49) Dapil 3 memperoleh suara sebanyak 2.275 saura.

d. A. Foky ardyanto (42) Dapil 4 memperoleh sura sebanyak 2.999 suara.

e. Mugiyono pujo kusumo (55) dapil 5 memperoleh suara sebanyak 1.738 suara.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Dalam penilitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut clark dan miler dalam Maleong (2004:131) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentudalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannyamaupun dalam peristilahannya.Alasan penulis memilih metode kualitatif karena dalam metode penelitian kualitatif terdapat beberapa teori yang dapat mendukung analisis peran BMI dalam suksesi pemilihan calon legislatif kota Yogyakarta. Selain itu alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena :

a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
b. Metode kualitatif secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi (lexy 2004:138).

Sedangkan tipe penilitian yang peneliti gunakan adalah tipe peneliatian deskripstif dimana tipe penelitian deskriptif menurut menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003 : hal 16) bahwa metode

deskriptif merupakan pencarian fakta dengan intrepetasi yang tepat. Selain mempelajari tentang permasalahan yang ada di dalam masyarakat tipe penelitian ini juga mempelajari bagaimana tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi tertentu. Termasuk mengenai hubungan-hubungan maupun pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena.

Dengan menggunakan metode tersebut di harapkan peneliti dapat menganalisis dan meneliti fenomena peran suatu organisasi sayap partai dalam suksesi pemilihan calon anggota legislatif berdasarkan dengan masalah yang ada di dalam masyarakat dengan fakta-fakta dan informasi yang actual dan akurat.

**2. Jenis data**

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan objek yang di teliti. Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah :

a. Data primer

Seperti yang kita ketahui bahwa data primer merupakan data yang dapat kita peroleh dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data di lapangan melalui wawancara dengan anggota BMI, Sekretaris BMI, dan dengan ketua BMI. Penelitian yang dilakukan terjun langsung ke posko BMI Yogyakarta dan dilakukan

selama 3 kali pertemuan dengan anggota BMI. Dari hasil penelitian tersebut peneliti telah mendapatkan beberapa data yang di butukan seperti struktur anggota BMI, jumlah anggota legislative yang lahir dari BMI dan bagaimana peran serta BMI dalam pemilihan legislatif.

b. Data sekunder

Berbeda dengan data sekunder yang mendapatkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan, data sekunder adalah bagaimana proses mendapatkan data melalui berbagai sumber seperti sumber bacaan. Dalam hal ini peneliti melakukan telaah pustaka dari penelitian sebelumnya berupa jurnal-jurnal, dan dari artikel terkait dengan peran aktif organisasi sayap partai BMI dalam rekruitmen maupun pencalonan anggota BMI sebagai calon anggota legislative. Dengan menggunakan sumber sumber informasi tersebut penulis akan mendapatkan data yang dapat memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang di butuhkan.

**3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan dan memperkuat informasi untuk penelitian. Dalam pembahan kali ini peniliti akan menjelaskan tekhnik-tekhnik yang di gunakan dalam mengumpulkan data-data yang di gunakan sebagai dasar analisa untuk menentukan hasil penelitian.

Untuk menentukan data yang akurat dan relevan peneliti menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Wawancara

   Wawancara adalah cara pengumpulan data yang di lakukan oleh peniliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal konsep penelitian terhadap individu ataupun narasumber yang menjadi unit analisa penelitian yang dianggap memiliki data yang di butuh kan untuk melengkapi penelitian ini. Data informan yang akan saya teliti meliputi :

   1. Ketua BMI (anggota BMI yang naik menjadi anggota legislatif dan akan menjadi calon petahana di tahun 2019 mendatang).
   2. Sekretaris BMI
   3. Anggota BMI
   4. Mantan anggota BMI

b. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen ataupun catatan yang mencatat bagaimana keadaan konsep penelituian yang ada di dalam unit analisa yang akan dijadikan objek penelitian. Dokumen atau data-data tersebut berkaitan dengan organisasi sayap partai BMI.

c. Observasi

   Obsevasi merupakan tekhnik pengumpilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan yang sedang terjadi di lapangan.

Observasi juga dapat dilakukan dengan mencatat kejadian maupun fenomena yang sedang terjadi. Dalam observasi kali ini peneliti mencoba melakukan observasi dengan datang langsung ke posko BMI kota Yogyakarta dan mendokumentasikan dalam bentuk video dan rekaman.

**4. Teknik analisis data**

Di dalam suatu penelitian di perlukan adanya analisis data yang berguna untuk menemukan jawaban terkait maslah yang di teliti. Unit analisa merupakan obyek analisis yang akan dijadikan obyek penelitian.Dalam hal ini peneliti membuat suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan mengambil unit analisa yang telah di temukan teknik analisa data. Seperti yang diungkapkan oleh Maleong (2004:103) Analisa data adalah proses mengatur urutan data serta mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori maupun satuan uraian dasar. Atau secara sederhana analisis data adalah proses menguraikan data secara berurytan dengan membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok agar mudah untuk di pahami.

Peneliatian yang di lakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan berdasrkan kemampuan penalaran dari peneliti dengan menghubungkan fakta dan informasi yang di dapatkan dengan memahami masalah yang muncul di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa langkah-langkah dalam menyusun suatu

penelitian langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Memahami data-data yang tersedia dari berbagai macam sumber yang telah di dapatkan selanjutnya,
2. Membuat sebuah abstraksi, atau membuat rangkuman tentang roses dan ini maupun pertanyaan yang perlu di perhatikan sehingga tetap berada di dalamnya.
3. Langkah berikutnya yaitu menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian satuansatuan tersebut akan di kategorikan pada langkah berikutnya.
4. Sedangkan tahap akhir dalam analisis data yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang sudah di dapatkan.
5. Redaksi data adalah sebagai proses untuk menyederhanakan data yang masih dalam bentuk kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Untuk selanjutnya data-data tersebut akan di kelompokkan agar mempermudah saat proses penelitian.